

5. Visioner: Adalah mempunyai wawasan atau pandangan jauh ke masa depan dan arah tujuan yang ingin dicapai.
6. Adil: Adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Peduli: Adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan.
8. Kerjasama: Adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal
9. Profesional: Adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, sehingga putusan dan tidakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

Kita harus menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam budaya kerja dan kehidupan jika ingin maju dan berhasil seperti Jepang. Konsep tersebut dapat dijadikan dorongan agar kita selalu berpikir mencari perubahan untuk memperbaiki cara kerja, dan cara pandang terhadap sesuatu.

Daftar Pustaka

- Ann Wan Seng. 2007. *Rahasia Bisnis Orang Jepang*. Jakarta: Hikmah
- Keene, Donald. 2006. Japanese Literature as a Bridge for the World . *Japan Echo* June 2006
- Saragih, Simon. 2008. Forum Ekonomi Dunia: Indonesia Seperti Kafilah Berlalu. *Kompas* 18 Juni 2008: 9
- Suhartris lakhadi, Deddy dan Wiyanto, Agus. 2007. Sembilan Nilai Dasar Rimbawan Sebagai Sumber Perubahan Sikap Untuk Melejitkan Kinerja Widyaiswara Sebagai Satria Rimbawan. *Silwika* Edisi 54/XII/2007
- Susanto, Adhi. 1992. Mengamati Aspek-Aspek Perkembangan Teknologi di Jepang dan di Indonesia. *Jurnal Studi Jepang*. 1 (2) 1992
- Tsunenari, Tokugawa and Akihiko Nakamura. 2007. The Way of the Samurai: Bushido as Character Education. *Japan Echo* April 2007

Tahun 2008: Tonggak Kebangkitan Atau Kebangkrutan Kepustakawanan?

Oleh: Sri Rumani

Abstrak

Kepustakawanan Indonesia pada tahun 2008 ini menjadi titik penentuan untuk menuju kebangkitan atau kebangkrutan. Momentum ini perlu dipertegas kembali mengingat profesi pustakawan sebagai modal intelektual perpustakaan mengalami kemandegan/ stagnan, terjebak rutinitas, dan terbelenggu oleh persoalan klasik. Kini persoalannya berpulang pada pustakawan sendiri apakah akan bangkit dari tidur panjang atau justru semakin mati suri untuk selanjutnya berhenti secara total.

Semangat kebangkitan nasional sebagai dorongan untuk tetap konsisten meretas kepustakawanan agar tetap eksis dalam berkiprah di masyarakat informasi ini. Apalagi dengan lahirnya

Undang-Undang No.43 Tahun 2007, dimana profesi pustakawan mendapat jaminan penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial, pembinaan karier, kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam tulisan ini akan dibahas apakah tahun 2008 ini sebagai tahun kebangkitan atau justru kebangkrutan bagi profesi pustakawan. Semuanya itu tergantung pada diri pustakawan sendiri. Untuk dapat menuju kebangkitan pustakawan yang perlu diperhatikan adalah kompetensi profesi dan kompetensi diri.

Kata Kunci: Kebangkitan Pustakawan. Profesi Pustakawan.

A. Latar Belakang

Tanggal 20 Mei 2008 genap 100 tahun organisasi Boedi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Stovia yang disponsori oleh dokter Sutomo. Gagap gempita acara 100 tahun kebangkitan diperingati di Stadion Bung Karno yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejenak kita diajak untuk mengingatkan beragamnya budaya dan tarian dari bumi Aceh sampai Papua. Sebagai bangsa kita bangga mempunyai kekayaan tarian daerah yang berbeda-beda, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI. Pro dan kontra pun muncul dari

adanya peringatan yang spektakuler di masa prihatin ini. Apapun pendapat orang yang pasti acara yang menghabiskan biaya itu mestinya mempunyai pesan moral untuk mempersatukan Negara Kesatuan Indonesia yang sudah terkoyak oleh berbagai kepentingan politik maupun non politik. Pastinya kita tidak ingin bangsa ini menjadi ajang pertumpahan darah hanya karena "ego" daerah, suku, agama, pandangan politik, usia, jenis kelamin, bahasa, dan warna kulit. Di masa yang sulit seperti ini kita seharusnya merapatkan barisan, dan menggalang perasaan sebangsa dan setanah air Indonesia.

Sekarang, apa hubungannya antara pustakawan dengan peringatan Kebangkitan Nasional? Adakah benang merahnya? Kenapa kebangkitan ini juga perlu diungkap? Sejauh mana kiprah pustakawan setelah 100 tahun terjadi Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi? Dalam tulisan ini akan diuraikan pernik-pernik kepus-takawanan menuju masyarakat informasi setelah 100 tahun Indonesia Bangkit dan 10 tahun mengalami masa Reformasi.

B. Kebangkitan Versus Kebangkrutan

Kebangkitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:76) berasal dari kata dasar bangkit yang berarti bangun (dari tidur, duduk) lalu berdiri, atau bangun (hidup) kembali, timbul, atau

terbit. Makna kebangkitan ini dapat juga disimak dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertema “Indonesia Pasti Bisa” pada peringatan ke 100 tahun Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2008 lalu yang menekankan tentang:

1. Kemandirian Bangsa.

Kemandirian berarti jangan sampai terjerat hutang, tidak tergantung pada teknologi dan perekonomian asing, dan tidak didikte oleh orang-orang asing. Penggunaan Software Open Source bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah salah satu upaya agar bangsa ini menjadi mandiri, tidak terlalu tergantung pada vendor asing maupun konsultan asing, dan sekaligus juga untuk menghemat devisa nasional.

2. Daya Saing Bangsa yang Tinggi.

Masyarakat yang cerdas, produktif, efisien, inovatif, kreatif, kerja keras, rajin, tepat waktu, dan tidak membuang-buang waktu. Kemampuan untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi adalah juga bagian dari peningkatan daya saing nasional bangsa Indonesia.

3. Peradaban Bangsa yang Tinggi:

Yakni masyarakat yang beradab, karakter yang terhormat, mulia, demokrasi, teratur, terencana, jujur, sikap toleransi yang tinggi, maju, namun juga tetap menjaga kesederhanaan.

Kondisi ini apabila dikaitkan dengan profesi pustakawan, yang secara formal diakui Pemerintah pada tahun 1988 itu, apa yang mereka lakukan. Kebangkitan di dunia kepustakawanan dimaknai sebagai era untuk terus memencarkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi kekuatan, komoditas, dan kebutuhan semua orang. Peringatan kebangkitan ini menjadi momentum tepat sebagai wahana introspeksi, evaluasi, dan memperbaiki diri dan profesi, serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepustakawanan. Semestinya sudah tidak perlu terjebak oleh persoalan-persoalan klasik misalnya dana, citra pustakawan dan perpustakaan, apresiasi masyarakat dan pimpinan, budaya baca, dan lainnya. Sebaiknya sekarang kita mulai bekerja dan berkarya terus yang muaranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka. Sudah waktunya kita bangkit dari tidur panjang ini, supaya para pustakawan tidak hanya menjadi penonton di tengah hingar bingar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan perpustakaan sejak tahun 1980 an telah mampu merubah citra perpustakaan dari negatif, kaku, dan membosankan itu menjadi positif, enak, dan mengasyikkan. Pemustaka sudah mulai menghabiskan waktu luangnya untuk berselancar di dunia maya di ruangan perpustakaan yang nyaman, dan aman.

Selayaknya kepercayaan pemustaka terhadap lembaga perpustakaan saat ini dapat dijadikan era kebangkitan di dunia kepustakawanan. Memang diakui bahwa pemanfaatan teknologi di perpustakaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun demikian pemustaka sudah merasa membutuhkan perpustakaan. Oleh karena itu pustakawan dan pengelola perpustakaan perlu memerhatikan keinginan dan kebutuhan pemustaka. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjalin jejaring dengan sesama profesi pustakawan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
2. Belajar terus menerus sepanjang hayat/*long life learning* untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar dapat mengikuti perkembangan.
3. Berkarya dan berinovasi untuk memberikan pelayanan prima tanpa melanggar prosedur dan aturan yang telah disepakati bersama.
4. Berjiwa kewirausahaan/*entrepreneurship* dengan tetap mengindahkan etika dan norma yang berlaku. Hal ini bukan menjadikan perpustakaan sebagai lahan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan.
5. Bersikap jujur, dapat dipercaya, sportif, dan transparan, dalam berlaku dan bertindak.
6. Terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak dibatasi oleh waktu dan

tempat. Sebab memperoleh informasi merupakan hak azasi tiap orang.

7. Berwawasan luas, menghargai pendapat orang lain, mempunyai prinsip, dan berkepribadian menarik/*inner beautiful*, sopan, dan supel.
8. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga ada koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik. Sehebat apapun pustakawan tidak akan bisa bekerja sendirian. Untuk maju bersama diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak
9. Selalu aktif dalam organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). IPI sebagai satu-satunya wadah resmi untuk para pustakawan yang memberikan advokasi bagi para anggotanya.
10. Berkompeten, secara pribadi (SQ, EQ), dan profesi (IQ), sehingga pustakawan dapat bersaing di era global ini, dan perannya semakin diperhitungkan.
11. Mengerti dan dapat mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan bahasa asing baik secara pasif maupun aktif.

Berkaitan dengan kompetensi pustakawan, Blasius Sudarsono (2005) menyatakan bahwa pustakawan Utama dan Madya semestinya mem-

punya *“core competencies”*, yang terdiri dari 7 kompetensi, yaitu filosofi dan etika, kelengkapan kepribadian, administrasi, manajemen koleksi, layanan publik, layanan teknis, dan teknologi.

Kemudian kebangkrutan mengandung makna menderita kerugian besar sehingga gulung tikar, atau bangkrut karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Makna bangkrut untuk profesi pustakawan adalah kondisi dimana profesi pustakawan ini tidak dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dengan demikian ada dan tidak ada ternyata tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Apalagi profesi ini masih dianggap asing oleh sebagian masyarakat dan jumlahnya sedikit yakni 2.972 orang (Kartini, 2008)

Profesi pustakawan masih asing, karena profesi ini belum sepopuler profesi lainnya seperti dokter, apoteker, hakim, jaksa, notaris, bankir, dosen, peneliti, dan lainnya. Ketidakpopuleran ini antara lain disebabkan kurangnya promosi dan sosialisasi. Di satu sisi justru pustakawan merasa “malu” karena “terlanjur” menjadi profesi pustakawan. Akibat dari sikap ini adalah mereka merasa rendah diri/*minderjarig* (bahasa Belanda).

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa mereka yang bekerja di perpustakaan termasuk pustakawan hanya sebagai penjaga buku. Maka

wajar mereka menganggap pustakawan itu rendah karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup tentang kepustakawanan. Di samping itu kegiatan pustakawan jarang diekspos oleh media massa cetak dan elektronik. Profesi ini selalu luput dari pemberitaan seperti profesi lain. Padahal media massa diakui sebagai alat yang paling baik untuk promosi, mengingat jangkauannya yang bisa sampai pelosok nusantara. Untuk itu semestinya pustakawan sendiri yang mensosialisasikan profesinya kepada masyarakat. Bagaimana caranya ? Caranya bekerja secara profesional, ramah, supel, jujur, ikhlas sehingga pemustaka merasa puas dengan kinerja pustakawan, jadi ada kesan positifnya. Apabila sudah ada kesan positif apresiasi itu akan berubah sendiri dan profesi pustakawan semakin dibutuhkan.

Disisi lain, pustakawan dikatakan langka karena baru ada 2.972 (Kartini, 2008). Data ini adalah yang berstatus sebagai PNS (sesuai dengan definisi pustakawan menurut Kepmenpan No.132/2002). Ini berarti bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 225 juta jiwa, ternyata kalau diprosentase baru mencapai 0,0012 persen. Rasionya setiap pustakawan harus melayani 78.479 orang. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan mengingat dalam masyarakat informasi, pustakawan sebagai agen perubahan/*agent of change* sehingga profesi pustakawan tidak hanya mengu-

rusi buku-buku dan majalah cetak, tetapi juga informasi digital yang dibutuhkan pemustaka.

C. Merajut Optimisme Profesi Pustakawan

1. Profesi Pustakawan

Profesi Pustakawan sangat prospektif, untuk berkembang dan dilirik orang. Pelan tetapi pasti bahwa profesi ini sudah mengalami kemajuan yang lebih baik bila dibandingkan dengan profesi yang serumpum misalnya arsiparis. Ternyata pustakawan sudah lebih menjanjikan baik ditinjau dari besarnya tunjangan maupun perkembangan kariernya. Padahal semestinya karier arsiparis sudah lebih dulu mendapat jaminan pendidikan dan karier berdasarkan UU No.7 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan. Kenyataannya arsiparis belum berkembang seperti pustakawan yang baru saja dijamin kelangsungan kariernya oleh UU No.43 Tahun 2007. Selayaknya pustakawan berbangga dan angkat topi dengan perjuangan para tokoh-tokoh senior pustakawan Indonesia. Mereka telah bersusah payah mengalami jatuh bangun untuk dapat meyakinkan Pemerintah sehingga diakui sebagai jabatan fungsional sejak tahun 1988.

2. Rumpun Jabatan Pustakawan

Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan. Contoh jabatan fungsional keahlian adalah Arsiparis dan Pustakawan sebagai fungsional ketrampilan yaitu Asisten Arsiparis dan Asisten Pustakawan.

Meningkatnya jabatan fungsional, ini diharapkan untuk dapat meminimalkan masalah birokrasi di Indonesia. Dengan Keppres No. 87 Tahun 1999 telah diatur rumpun jabatan fungsional PNS. Dalam Keppres tersebut ada 25 jenis rumpun jabatan fungsional PNS selain pustakawan adalah rumpun jabatan matematika, dan statistik, rumpun kekomputeran, rumpun ilmu hayat, rumpun pengawasan dan keamanan.

3. Syarat dan Jenjang Jabatan Pustakawan

Jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

- a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);

- b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian menurut pasal 5 dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:
 - a). Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - b). Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c). Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utama

nya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- d). Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

Sedang Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

- a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
- b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional ketrampilan menurut pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:

- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang

jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

4. Besarnya Tunjangan Fungsional Pustakawan

PNS yang menduduki jabatan menduduki jabatan fungsional pustakawan mendapat tunjangan fungsional di luar gaji setiap bulannya. Besarnya untuk tingkat keahlian diusulkan

- a. Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia (menurut Perpres No.26/2007 sebesar Rp 5.550.000,-).
- b. Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa (Rp Rp 4.375.000,-)
- c. Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa (Rp 1.260.000,-).
- d. Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa. (Rp 540.000,-)

Sedangkan besarnya tunjangan jabatan fungsional ketrampilan diusulkan:

- a. Jenjang Penyelia, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa (Rp 1.260.000,-)

- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa (Rp 540.000,-)
- c. Jenjang Pelaksana, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Va (Rp Rp 360.000,-)
- d. Jenjang Pelaksana Pemula, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Vb.(tidak ada datanya).

Kalau memperhatikan pemaparan diatas ternyata tunjangan pustakawan masih belum sesuai seperti yang dituangkan dalam Keppres No.87 Tahun 1999. Namun demikian sesuai kelayakan dan kemampuan Pemerintah, maka tunjangan pustakawan kini telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 47 Tahun 2007 yang berkisar antara Rp 240.000,- s/d Rp 700.00,-, dan ini sudah lebih tinggi bila dibandingkan dengan tunjangan Arsiparis. Menurut Keppres No.40 Tahun 2006 Arsiparis mendapat tunjangan antara Rp 197.000,- s/d Rp 550.000. Juga lebih tinggi dari tunjangan fungsional umum, dimana pegawai negeri sipil golongan IV (semua golongan) hanya mendapat Rp. 185.000,-/bulan. Sedangkan tunjangan fungsional pustakawan terendah golongan II/b sebesar Rp. 225.000,-/bulan. Ini menandakan bahwa profesi Pustakawan sudah mendapat apresiasi dari pemerintah,

meskipun masyarakat belum memberikan penghargaan sebagaimana layaknya. Hal ini masih harus diperjuangkan terus menerus.

5. Profesi Pustakawan adalah Pilihan

Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2). Hal ini berarti bahwa pustakawan juga mempunyai hak yang sama untuk hidup layak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas gaji dan tunjangan fungsional yang besarnya sudah ditentukan dalam Keppres No. 47 Tahun 2007. Bila dibandingkan dengan arsiparis sudah lebih besar, namun bila dibandingkan dengan profesi yang lain misalnya dosen dan guru, ternyata masih ada dibawahnya. Itu saja bagi pustakawan yang PNS, bagi yang non PNS belum mendapat tunjangan, sehingga menjadi pustakawan adalah pilihan hidup yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Dengan demikian, maka tidak aneh apabila ada beberapa pustakawan yang pindah jalur ke jalur struktural yang dikira lebih menjanjikan. Masalahnya, mengingat profesi pustakawan di Indonesia masih langka, akan lebih baik ilmunya dimanfaatkan di jalur fungsional, sehingga kepustaawanan di Indonesia dapat berkembang.

C. Penutup

Judul diatas yang berupa kalimat tanya, hanya bisa dijawab secara tepat oleh para pustaka

wan berlandaskan sikap jujur sesuai dengan hati nurani. Setidaknya tahun 2008 dapat dijadikan tonggak berharga apakah sebagai kebangkitan atau justru kebangkrutan bagi dunia kepustakawanan di Indonesia. Secara intern pustakawan sendiri untuk menentukan nasib profesinya, sedang secara ekstern pemerintah sebagai regulator andilnya juga ditentukan oleh bagaimana pustakawan dapat mempresentasikan profesinya. Kesimpulannya bangkit dan bangkrutnya profesi pustakawan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja, profesionalisme pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Oleh karena itu sebagai pustakawan harus jeli dalam melihat peluang-peluang yang semakin jelas dan terbuka lebar untuk tidak ragu-ragu lagi melibatkan diri sebagai agen perubahan bagi lingkungannya.

Dengan disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, semakin terbuka jalan yang lapang untuk profesi pustakawan. Saatnya pustakawan berpikiran secara visioner, tetapi tetap berpijak di dunia nyata. Tahun 2008 ini sebagai masa peralihan antara generasi tua dan generasi muda di lingkungan pustakawan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada harapan yang besar bahwa generasi muda pustakawan akan mampu merubah dunia kepustakawanan di Indonesia. Semoga.

Daftar Pustaka

- Hernandono. *Problem Yang Dihadapi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama. Makalah Kerja Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama se Indonesia di Jakarta tanggal 29-31 Agustus 2005*
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20070531114255>,
diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 14.46
- <http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/keppres/kp199987.htm>. diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 15.44.
- <http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=2000+7&f=ps28-2007.htm>
diunduh tgl 22 Juni 16.46 .
- <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=rumpun+pustakawan&meta=0%3DcountryID>
diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 19.06
- Kartini. *Pengembangan Jabatan Pustakawan. Makalah Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Jakarta tanggal 23 - 24 Juli 2008*
- Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Pidato Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono pada Hari Kebangkitan Nasional ke 100 Tahun; Kemandirian, Daya Saing, dan Peradaban Yang Tinggi.

Sudarsono, B. *Membangun Kemampuan Pustakawan.*
Makalah Kerja
Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama Se In-
donesia di Jakarta tanggal 29-31 Agustus 2005

Perangkat Lunak Gratis: Awal Kebangkitan Perpustakaan di Tanah Air

Oleh: Heri Abi Burachman Hakim

Pendahuluan

Bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, itulah analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi perpustakaan di negeri ini. Di satu sisi ada perpustakaan yang telah maju pesat dan mampu menjelma sebagai perpustakaan yang diperhitungkan. Di sisi lain ada perpustakaan yang kondisinya memprihatinkan karena berbagai keterbatasan. Dengan demikian terjadi ketimpangan dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Perpustakaan yang maju dan dapat menjadi perpustakaan yang diharapkan masyarakat antara lain adalah perpustakaan yang mampu mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini akan

memungkinkan perpustakaan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada pemakai... Optimalisasi eksistensi teknologi informasi dan komunikasi terlihat dari implementasi otomasi serta pembangunan perpustakaan digital. Otomasi perpustakaan memungkinkan perpustakaan melakukan pelayanan secara otomatis dengan komputer sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan benar. Sedangkan digitalisasi perpustakaan memungkinkan koleksi perpustakaan dapat diakses oleh pengguna tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Konsep perpustakaan seperti ini tentu akan semakin memajukan pustaka dalam mengakses layanan perpustakaan.

Namun demikian di sisi lain masih banyak perpustakaan yang kondisinya memprihatinkan. Perpustakaan ini biasanya kurang mendapat perhatian serius. Pengolahan koleksi, layanan peminjaman, dan pengembalian koleksi pada perpustakaan yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya dilakukan secara manual. Dengan layanan manual ini perpustakaan tidak mampu memberikan layanan yang cepat.

Salah satu penyebab tidak semua perpustakaan mampu melakukan otomasi adalah harga perangkat lunak yang mencapai angka jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Bahkan sering terjadi bahwa harga perangkat lunak ini lebih mahal dari pada harga perangkat keras.

Di tengah mahalanya harga perangkat lunak untuk membangun otomasi dan perpustakaan digital, maka bagi perpustakaan yang tidak mampu menjangkau perangkat lunak komersil dapat menggunakan perangkat lunak gratis sebagai alternatif. Sebab . saat ini banyak perangkat lunak gratis yang dapat digunakan oleh perpustakaan baik untuk otomasi perpustakaan maupun untuk membangun perpustakaan digital.

Sayang, tidak semua pengelola perpustakaan mengerti tentang keberadaan perangkat lunak gratis ini. Padahal seiring dengan semakin terjangkaunya harga perangkat keras, perangkat lunak gratis dapat menjadi alternatif sebagai pengganti perangkat lunak komersil. Keberadaan perangkat lunak ini semakin membuka peluang bagi perpustakaan untuk melakukan otomasi perpustakaan atau membangun perpustakaan digital.

Untuk memberikan pengetahuan tentang perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan, penulis mencoba memaparkan dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini mampu memberikan pengetahuan tentang perangkat lunak gratis yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan serta menyadarkan pengelola perpustakaan bahwa membangun otomasi dan perpustakaan digital bukanlah pekerjaan yang sulit dan mahal.

Perangkat Lunak Gratis Sebagai Peluang

Implementasi otomasi dan pembangunan perpustakaan digital diperlukan sedikitnya dua komponen utama. Komponen tersebut adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Jika kedua komponen ini tidak terpenuhi maka otomasi dan digitalisasi perpustakaan hanyalah sebuah konsep.

Selama ini membangun perpustakaan digital atau otomasi perpustakaan dianggap merupakan program yang mahal. Otomasi atau pembangunan perpustakaan digital menjadi program yang mahal karena perpustakaan harus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak sekaligus. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan inilah yang menyebabkan tidak semua perpustakaan di Tanah Air mampu melakukan otomasi perpustakaan atau membangun perpustakaan digital.

Akan tetapi, saat ini muncul harapan bagi seluruh perpustakaan di Tanah Air untuk melakukan otomasi atau membangun perpustakaan digital. Harapan ini muncul di saat harga perangkat keras yang makin terjangkau oleh perpustakaan serta tersedianya perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan. Saat ini harga perangkat keras semakin terjangkau, komputer dan perangkat keras lainnya bukan lagi barang mewah bagi masyarakat Indonesia. Selain itu tersedianya berbagai aplikasi software yang dapat digunakan

secara gratis semakin membuka peluang perpustakaan untuk melakukan otomasi perpustakaan dan membangun perpustakaan digital.

Dengan semakin terjangkaunya harga perangkat keras dan tersedianya perangkat lunak gratis maka biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka otomasi perpustakaan menjadi semakin murah. Pengelola perpustakaan cukup menyiapkan anggaran pengadaan perangkat keras karena perangkat lunak dapat diperoleh secara gratis. Saat ini modal utama untuk membangun otomasi perpustakaan hanyalah perangkat keras. Pengelola perpustakaan tidak akan dipusingkan dengan masalah harga perangkat lunak otomasi.

Eksistensi perangkat lunak gratis semakin membuka peluang bagi perpustakaan di Indonesia untuk melakukan otomasi. Bagi perpustakaan yang tidak memiliki keterbatasan anggaran, maka dapat memanfaatkan perangkat lunak gratis ini.

Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis oleh perpustakaan setidaknya dapat dibedakan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu perangkat lunak yang masuk dalam kategori *open source*. Sedangkan kategori yang kedua yaitu perangkat lunak yang termasuk dalam kategori *freeware*.

Perangkat lunak gratis yang termasuk dalam

kategori *open source* secara harfiah dapat dipahami sebagai perangkat lunak berbasis *open source* yang dapat diperoleh dan digunakan secara gratis oleh perpustakaan. Sedangkan definisi dari perangkat lunak berbasis *open source* sendiri adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna memperoleh perangkat lunak lengkap dengan *source code* perangkat lunak tersebut sehingga memungkinkan pengguna memodifikasi *source code* sesuai dengan kebutuhan. Jika pengguna dapat memodifikasi *source code* perangkat lunak berarti pengguna dapat memodifikasi perangkat lunak tersebut sesuai kebutuhan. Dengan demikian perangkat lunak gratis yang termasuk dalam kategori *open source* dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

Berbeda dengan perangkat lunak yang termasuk dalam kategori *open source*, perangkat lunak *freeware* adalah perangkat lunak yang dapat diperoleh secara gratis tanpa disertai *source code* perangkat lunak dan walaupun *source code* diberikan, pengguna tidak memiliki kekuatan legal untuk mengubah atau mendistribusikan kembali *source code* perangkat lunak (Pendit, 2007; 1997). Karena *source code* pada jenis perangkat lunak ini tidak dapat diperoleh oleh pengguna. Oleh karena itu pengguna tidak memiliki peluang untuk memodifikasi perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dapat digunakan secara

gratis oleh perpustakaan ada yang *freeware*. Pengelola perpustakaan hendaknya mampu memilih jenis perangkat lunak yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan perangkat lunak gratis *open source* atau *freeware*.

Perangkat Lunak Gratis untuk Otomasi Perpustakaan

Definisi otomasi perpustakaan adalah pemanfaatan mesin, komputer, dan peralatan elektronik lainnya untuk memperlancar tugas-tugas perpustakaan (Lasa HS, 1998). Definisi yang sama tentang otomasi perpustakaan juga diungkapkan oleh Kumorotomo dan Subandono (1999), menurut mereka otomasi perpustakaan adalah pemanfaatan komputer untuk pengelolaan aktivitas perpustakaan yang menyangkut pengadaan bahan pustaka, pengolahan, dan pelayanan.

Berdasarkan dua definisi di atas maka otomasi perpustakaan tidak hanya sebatas memanfaatkan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau pemanfaatan komputer untuk membangun database koleksi perpustakaan. Selama ini pengelola perpustakaan sering beranggapan bahwa apabila perpustakaan telah menggunakan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau telah memiliki database koleksi perpustakaan yang dapat diakses melalui OPAC (Online Public Access Catalog) atau

katalog komputer maka perpustakaan tersebut telah terotomasi. Otomasi bukan hanya pemanfaatan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau memanfaatkan komputer untuk membangun database koleksi perpustakaan. Otomasi perpustakaan mencakup pemanfaatan komputer dalam seluruh kegiatan perpustakaan seperti pengadaan bahan pustaka, pengolahan, pelayanan, penelusuran, dan penyusunan laporan.

Untuk melakukan otomasi diperlukan perangkat lunak otomasi perpustakaan. Perangkat lunak ini dapat diperoleh dengan cara membeli atau menggunakan perangkat lunak gratis. Ternyata tidak semua perpustakaan mampu membeli perangkat lunak ini karena harganya yang cukup mahal. Apalagi bagi perpustakaan yang memiliki keterbatasan anggaran.. Mahalnya harga perangkat lunak otomasi inilah yang menyebabkan banyak perpustakaan yang tidak mampu melakukan otomasi perpustakaan.

Sebagai alternatif, agar perpustakaan mampu melakukan otomasi perpustakaan, pengelola perpustakaan dapat menggunakan perangkat lunak gratis. Perangkat lunak gratis tersebut ada yang bersifat *open source* atau bersifat *freeware*. Perangkat lunak gratis bersifat *open source* yang dapat digunakan perpustakaan untuk membangun otomasi perpustakaan antara lain OpenBiblio([\[sourceforge.net\]\(http://sourceforge.net\)\), Koha\(\[www.kora.org\]\(http://www.kora.org\)\), emilda \(\[www.emilda.org\]\(http://www.emilda.org\)\), PhpMyLibrary\(\[www.phpmylibrary.org\]\(http://www.phpmylibrary.org\)\), Otonomigen.X \(\[www.krmg.itb.ac.id\]\(http://www.krmg.itb.ac.id\)\), X-igloo \(<http://sourceforge.net/projects/iglooyha/>\) dan Senayan. Software tersebut saat ini sedang hangat diperbincangkan karena perangkat lunak ini memiliki fasilitas yang lengkap sebagai sebuah perangkat lunak berbasis *open source* \(\[www.senayan.diknas.go.id\]\(http://www.senayan.diknas.go.id\)\). Sedangkan perangkat lunak gratis yang bersifat *freeware* adalah Athenaum Light dan perangkat lunak ini yang paling banyak digunakan oleh perpustakaan di Indonesia.](http://obiblio.</p></div><div data-bbox=)

Dari Berbagai Aplikasi di atas OpenBiblio, Koha, Emilda, PhpMyLibrary dan Atheneum Light adalah perangkat lunak gratis buatan luar negeri. Sedangkan Otomigen-X, X-igloo dan Senayan adalah perangkat lunak gratis buah karya putra-putri Indonesia.

Berbagai perangkat lunak yang telah disebutkan di atas adalah sedikit contoh dari perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan untuk membangun otomasi perpustakaan secara gratis. Jika ingin melihat perangkat lunak gratis lainnya yang dapat digunakan secara gratis dapat dilihat di situs www.sourceforge.net. Di dalam situs ini terkumpul banyak perangkat lunak berbasis *open source* untuk perpustakaan, apakah itu perpustakaan untuk membangun oto-

masi perpustakaan atau untuk membangun perpustakaan digital.

Perangkat Lunak Gratis untuk Perpustakaan Digital

Secara sederhana perpustakaan digital dapat dipahami sebagai perpustakaan yang menghimpun koleksi dalam format digital (koleksi digital). Koleksi digital ini dapat berupa file-file komputer dalam format .doc, xls, pdf, audio, jpg, png dan masih banyak lagi format file lainnya. Dengan koleksi dalam format digital ini memungkinkan pengguna mengakses koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

Menghimpun koleksi digital ini dapat dilakukan dengan menelusur informasi digital di Internet kemudian mengunduhnya dan menjadikannya sebagai koleksi perpustakaan atau dengan cara mendigitalkan koleksi perpustakaan. Cara yang kedua inilah cara yang membutuhkan energi serta dana yang besar.

Setelah perpustakaan memiliki koleksi digital maka perpustakaan perlu menyajikan koleksi tersebut dengan sistem layanan tertentu sehingga koleksi tersebut mudah diakses. Caranya adalah dengan menggunakan perangkat lunak perpustakaan digital. Perangkat lunak perpustakaan digital memungkinkan pengguna menelusur koleksi digital yang dimiliki perpustakaan sekaligus meng-

akses koleksi digital tersebut langsung dari perangkat lunak tersebut.

Untuk membangun perpustakaan digital tidak perlu menganggarkan dana pembelian perangkat lunak. Perpustakaan dapat menggunakan perangkat lunak secara gratis. Perangkat lunak yang dimaksud antara lain adalah Ganesha Digital Library (GDL) atau Greenstone Digital Library. Kedua perangkat lunak perpustakaan digital ini termasuk dalam kategori perangkat lunak berbasis *open source*. GDL dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada web KMRG ITB di www.kmrg.itb.ac.id. dan greenstone dapat diperoleh dengan mengunduhnya di www.greenstone.org.

Kini telah banyak perpustakaan yang telah menggunakan kedua perangkat lunak ini untuk membangun perpustakaan digital. Akan tetapi diantara kedua perangkat lunak ini GDL adalah perangkat lunak perpustakaan digital yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Penutup

Pada paparan di atas telah disebutkan banyak perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan. Perangkat lunak gratis tersebut dapat digunakan untuk melakukan otomasi atau pembangunan perpustakaan digital.

Jika melihat begitu banyaknya tersedia perangkat lunak gratis untuk membangun otomasi

perpustakaan maka tidak ada lagi alasan untuk menunda otomasi perpustakaan atau pembangunan perpustakaan digital. Pengelola perpustakaan tidak dapat lagi mengkambing hitamkan ketidaktersediaan perangkat lunak sebagai penyebab kegagalan otomasi perpustakaan atau pembangunan perpustakaan digital. Saat ini yang diperlukan adalah motivasi pengelola perpustakaan untuk belajar menggunakan berbagai perangkat lunak gratis.

Perpustakaan tidak perlu takut menggunakan perangkat lunak gratis. Memang pihak pengembang tidak memberikan garansi atas penggunaan perangkat lunak tersebut, sehingga apabila di dalam perangkat lunak terdapat *bugs* (kelemahan atau kekurangan) semua menjadi resiko pengguna. Namun demikian, setiap perangkat lunak gratis memiliki forum atau *mailing list* pengguna. Melalui *mailing list* atau forum pengguna para pengguna perangkat lunak gratis saling bertukar pengalaman, berbagi ilmu dan mencoba untuk menyempurnakan perangkat lunak jika di dalam perangkat lunak tersebut terdapat *bugs*.

Banyak *mailing list* yang dapat digunakan sebagai sarana belajar memanfaatkan perangkat lunak gratis. Saat ini ada *toolib*, *ics-isis*, *the-ics* dan *idln* yang merupakan *mailing list* di bidang perpustakaan yang akan membantu jika saat menggunakan perangkat lunak ini perpustakaan mengalami masalah. Bahkan perangkat lunak Senayan

menyediakan forum khusus yang membahas tentang *bugs-bugs* yang ada di dalam senayan. Semua masalah akan dipecahkan secara bersama melalui *mailing list* ini.

Eksistensi perangkat lunak ini dapat dijadikan sebagai awal kebangkitan perpustakaan di Indonesia. Bangkit di tengah keterpurukan karena tidak tersedianya dana bagi pengembangan perpustakaan. Jika seluruh perpustakaan di Indonesia mampu memanfaatkan eksistensi perangkat lunak gratis maka seluruh perpustakaan akan mampu menjadi perpustakaan impian pemustaka. Apabila ini terwujud maka perpustakaan tidak akan dipandang sebelah mata.

Semoga dengan momentum peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan semakin populer-nya perangkat lunak gratis kondisi perpustakaan di negeri ini mulai berubah. Perubahan menjelma sebagai institusi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anctil, Eric dan Jamshid Beheshti. 2004. "Open source Integrated Library Systems: An Overview". Dalam <http://www.anctil.org/users/eric/oss4ils.html>, tanggal 1 Maret 2007, Pukul 08.00

- Kumoroto, Wahyudi dan Subandono Agus Margono .1999. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hakim, Heri Abi Burachman.. *Evaluasi Kualitas OpenBiblio Sebagai Perangkat Lunak Otomasi Perpustakaan Berbasis Open source*. *Fihris*, II (1), 2007
- Lasa Hs. 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Yogyakarta, Kanisius
- 2005. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta, Gama Media.
- Pendit, Laxman Putu dkk. 2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Yogyakarta, Sagung Seto.
- Purwoko; Hakim, Heri Abi Burachman; dan Arif Surachman. *Kajian Awal Aplikasi Open source untuk Otomasi Perpustakaan: Studi Kasus X-igloo, OpenBiblio, Weblis, PhpMyLibrary*. *Fihris*, I (1) 2006
- Vimal Kumar V. 2007. "Selection and Management of Open source Software in Libraries". Dalam <http://eprints.relis.org>. tanggal 3 Maret 2007, Pukul 10.00.
- Wahono, Romi Satria. 2006. "Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi Perpustakaan". Dalam www.ilmukomputer.com tanggal 27 Februari 2007, Pukul 09.00.

Memahami Perilaku Pengguna

Oleh: Pergola Irianti

Pendahuluan

Komunikasi antargenerasi sejak tahun 1908 sampai saat ini masih berlangsung dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih diingatnya peristiwa satu abad yang lalu, yakni kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan momen untuk mengenang didirikannya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Pendirian tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bangsa Indonesia untuk melawan penjajah.

Semangat tersebut telah membawa kemajuan bangsa sampai era teknologi informasi ini. Beraneka ragamnya teknologi canggih saat ini telah membawa perubahan pada manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok (masyarakat).

Kondisi ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya termasuk tuntutan terhadap kondisi perpustakaan. Untuk itu perpustakaan harus melakukan perubahan apabila tidak ingin ditinggalkan pemustakanya.

Dengan perubahan tersebut, perpustakaan diharapkan tetap eksis dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dalam rangka ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perpustakaan harus menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan akan mampu menangani sebagian besar pekerjaan teknis perpustakaan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia perpustakaan dalam pekerjaan teknis lambat laun akan berkurang.

Perubahan paradigma perpustakaan

Perubahan paradigma perpustakaan bertujuan untuk mengadaptasi gejolak perubahan eksternal dan pemanfaatan peluang. Hal ini menyebabkan perubahan sistem layanan jasa perpustakaan dan informasi jauh lebih luas daripada sekedar layanan pinjam buku, layanan referensi, layanan penelusuran dan lainnya. Menurut Buckland (1988) layanan tersebut berubah dari layanan perpustakaan menjadi layanan informasi. Hal ini berakibat pada derasnya arus kebutuhan

terhadap informasi yang baru pula. Oleh karena itu dengan perubahan paradigma perpustakaan itu, perpustakaan diharapkan memberikan layanan prima. Yakni bentuk layanan yang berorientasi pada pengguna.

Dikemukakan oleh Mustafa (1998) bahwa pada era teknologi informasi akan membawa perubahan paradigma layanan perpustakaan. Akibat perubahan paradigma tersebut antara lain; 1) prestasi perpustakaan bukan lagi diukur berdasarkan kekayaan koleksi dan jumlah pengunjung ke perpustakaan, melainkan dari jumlah orang yang menggunakan layanan, meskipun mereka tidak datang secara fisik ke perpustakaan; 2) penyediaan fasilitas perpustakaan berteknologi tinggi, harus lebih mengarahkan pustakawan pada penyediaan muatan informasi yang dapat disajikan kepada pengguna. Dalam hal ini pustakawan harus mengubah sikap dan budaya kerja yang menuntut kerja cepat, tepat, dan efisien.

Berkaitan dengan pelayanan ini, menurut Mustafa (1998), ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan agar memiliki citra yang lebih positif. Kompetensi itu antara lain: berorientasi pada kebutuhan pemustaka, memiliki kemampuan-kemampuan; berkomunikasi dengan baik, berbahasa asing yang memadai, pengembangan secara teknis dan prosedur kerja, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,

dan melaksanakan penelitian bidang perpustakaan.

Pemegang kendali perpustakaan dengan paradigma baru tersebut, sepenuhnya tetap ada pada para pustakawan. Pustakawan sebagai individu memiliki keunikan dalam bertindak atau bertingkah laku. Keunikan tersebut sering tidak disadari oleh pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan masalah kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan ini pernah dilakukan penelitian. Handayani, dkk. (2004) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa dari lima dimensi (indikator) kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan, ada dua dimensi yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Kedua dimensi tersebut adalah ketanggapan dan jaminan yang meliputi: kesediaan pustakawan membantu pemustaka menemukan informasi, ketanggapan pustakawan terhadap masalah yang disampaikan oleh pengguna, sikap ramah pustakawan, dan komunikasi pustakawan dengan pemustaka. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar pustakawan diberikan pelatihan terkait dengan cara berkomunikasi dan etika layanan.

Penelitian Supriadi, dkk. (2004) menyimpulkan bahwa perhatian pustakawan dalam melayani pemustaka perlu lebih ramah dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu disarankan agar pustakawan yang bertugas di bidang layanan

perlu ditambah wawasan mengenai konsep layanan yang berorientasi pemustaka/*user oriented*

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Widodo (2005) melakukan penelitian mengenai kepuasan petugas perpustakaan yang terkait dengan intensi prososial. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara intensi prososial dengan kepuasan kerja pustakawan, dimana semakin tinggi intensi prososial akan semakin tinggi pula kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perilaku prososial pustakawan terhadap pemustaka lebih sering dilakukan, maka kepuasan kerjanya meningkat dan kepuasan pengguna menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas ada dua hal penting bagi pustakawan untuk mengubah sikap dan mampu berperilaku sebagai pustakawan profesional, sehingga citra positif menjadi label pustakawan masa kini. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, kesediaan membantu menemukan informasi, tanggap terhadap masalah yang disampaikan pengguna, bersikap ramah, memiliki sikap prososial yang tinggi merupakan sebagian dari bentuk-bentuk perilaku yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka. Pengetahuan perilaku manusia pada umumnya dibahas secara lengkap dalam ilmu Psikologi.

Psikologi di perpustakaan

Pengertian psikologi menurut Crow & Crow (Djamarah, 2002) adalah ilmu yang mempelajari dan berusaha memahami tingkah laku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, serta memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan.

Secara umum beberapa definisi psikologi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain Mussen dan Rosenzweig, Woodworth dan Marquis, serta Morgan (Septiyantono, 2003) yang menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti dan mengkaji tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan interaksi antarmanusia.

Terkait dengan tugas perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, Sugiarto (1999) menjelaskan bahwa dimensi kualitas layanan terdiri atas: (1) tanggung jawab/*responsibility*, yakni tanggung jawab yang mencakup kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan serta keakuratan dalam memberikan informasi, (2) kepekaan/*responsiveness*, yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengguna yang diiringi dengan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tersebut, (3) kepastian layanan/*assurance*, yaitu bentuk layanan langsung dalam membantu pemustaka, yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan, (4) empati, merupakan kemampuan untuk

memahami dan memperhatikan kondisi psikologis pemustaka, yang dalam hal ini diperlukan upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pemustaka. Diungkapkan pula oleh Sugiarto (1999) bahwa layanan yang baik adalah layanan yang sangat memperhatikan individu sebagai pribadi yang unik dan menarik. Untuk itu layanan yang baik harus disesuaikan dengan konsep pribadi yang meliputi unsur-unsur kepribadian, penampilan, perilaku dan komunikasi, yaitu ramah, sopan dan penuh hormat, yakin, rapi, ceria, senang memaafkan, senang bergaul, senang belajar dari orang lain, senang pada kewajaran dan menyenangkan orang lain.

1. Perilaku pemustaka

Pada uraian sebelumnya dikemukakan bahwa layanan perpustakaan pada era teknologi informasi, didominasi oleh media internet. Meskipun demikian penulis yakin bahwa masih ada pemustaka yang menyempatkan diri untuk berkunjung secara fisik ke perpustakaan. Dalam kondisi ini pustakawan perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai agar mampu memberikan layanan prima kepada pemustaka.

Dalam komunikasi dengan pemustaka, pustakawan perlu mempelajari seluk beluk perilaku pengguna sebagai wujud dari seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Agar pustakawan berhasil menganalisis perilaku pemustaka, perlu dipikirkan

sebelumnya: siapa pemustaka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, serta kapan dibutuhkan?

Menurut Mangkunegara (2005), perilaku pemustaka adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa yang dibutuhkan yang dapat dipengaruhi lingkungan. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pemustaka. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, pemustaka akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi rasa puas.

Dalam memberikan layanan, pustakawan harus mampu mengangkat dan melindungi harga diri pemustaka tanpa terhalang oleh penampilannya. Pustakawan perlu menciptakan hubungan baik dan selalu bersikap proaktif, memberikan sambutan lebih dahulu, menawarkan bantuan apa yang dapat dilakukannya, dan mampu memberikan perasaan nyaman pemustaka sebelum memperoleh apa yang mereka butuhkan.

Menurut Septiyantono (2003) ada berbagai sifat dan karakter pemustaka yang perlu dipahami agar pustakawan dapat menghadapinya dengan baik. Berikut ini beberapa karakter dan cara menghadapi pemustaka: (a) pendiam dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik

perhatiannya, (b) tidak sabar, dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin, (c) banyak bicara dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya, (d) banyak permintaan, dengarkan dan segera penuhi permintaannya serta minta maaf dan memberi alternatif lain apabila permintaan tidak tersedia, (e) peragu, dengan memberi kepercayaan, tenang, dan tidak memberikan banyak pilihan namun mengikuti seleranya, (f) senang membantah harus dihadapi dengan tenang, dan jangan pernah terpancing untuk berdebat, (g) lugu dihadapi dengan menerima apa adanya, menanyakan keperluaannya dan melayani berdasarkan permintaan, (h) siap mental, dihadapi dengan membiarkannya memilih yang dikehendaki, tanpa banyak bertanya, memuji pemakai dan ucapkan terimakasih atas kunjungannya, (i) yang curiga dihadapi dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah petugas lebih unggul, (j) yang sombong hadapi dengan tenang, sabar menghadapi sikapnya dan tidak terlalu serius, serta berikan kesan bahwa pemustaka tersebut perlu dihormati.

2. Perilaku pustakawan

Sebagai sosok yang memberikan layanan kepada pemustaka, pustakawan diharapkan

memiliki kepribadian yang baik agar mampu memberikan layanan terbaik. Kepribadian menurut Heldebrand (Septiyantono, 2003) adalah sesuatu hal yang baik atau tidak baik dalam hal kelazimannya dan direspon secara positif atau negatif oleh mereka yang melakukan kontak.

Menurut Stern (Septiyantono, 2003), potensi yang dimiliki oleh seseorang dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diharapkan mampu mengembangkan kepribadiannya secara optimal agar mampu mempengaruhi pemustaka untuk selalu menggunakan jasa yang tersedia di perpustakaan.

Menurut Mangkunegara (2005), sebenarnya pustakawan layanan identik dengan pribadi penjual jasa. Berdasarkan falsafah penjual yang dikemukakan Mangkunegara tersebut, yaitu bagaimana menjual dapat memberi kepuasan bagi kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun bagi pihak penjual. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diperlukan upaya layanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi pemustaka maupun bagi dirinya sendiri. Selain perhatian terhadap pemustaka perlu pula dipikirkan bagaimana menciptakan hubungan baik dan berkelanjutan, dengan demikian pustakawan akan memperoleh minimal dua keuntungan yaitu perpustakaan menjadi terkenal dan citra sebagai pustakawan profesional lebih terangkat.

Septiyantono (2003) juga mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan pustakawan dalam memberikan layanan prima, antara lain: (a) mampu berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, (b) mampu bekerja secara individual maupun kelompok, (c) mampu berkomunikasi dalam tiga konsep yaitu sikap, perhatian, dan tindakan.

Penutup

Rendahnya kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dapat disebabkan masih rendahnya pengetahuan pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka. Hal ini perlu mendapat perhatian para pengelola perpustakaan. Interaksi yang merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pustakawan dan pemustaka dengan karakteristik atau pribadi yang berbeda, kadang menimbulkan masalah dalam komunikasi.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, perlu kiranya pengelola perpustakaan membekali para pustakawan dengan pelatihan layanan jasa, pelatihan kepribadian dan sebagainya yang intinya lebih meningkatkan kualitas hubungan antar-individu untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan.

Daftar Pustaka

- Buckland, Michael K. 1988. *Library and Services in Theory and Content*, 2nd ed. London: Pergamon Press.
- Djamarah, S. B. 2002. *Psikologi Belajar*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handayani, R., Keban, Y.T., Ratminto Analisis Kepuasan Pemakai Terhadap Layanan Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiosains*, April, 17 (2) 2004, : 303-317
- Mangkunegara, A.A. A.P. 2005. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustafa, B. 1998. Perubaaan Paradigma Layanan Perpustakaan Memasuki Era Teknologi Informasi, dalam E. Koswara, dkk., *Dinamika Informasi Dalam Era Global*. Bandung: Pengurus Daerah IPI Jawa Barat dan Remaja Rosdakarya.
- Septiyantono, Tri dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga.
- Sugiarto, E. 1999. *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, Eri; Darwin; dan Moelyono. Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan Pada UPT Perpustakaan Universitas Jember. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*", Volume II, (1) 2004, : 22-31.

- Widodo, S.; Moelyono; Isbandiyah.. Hubungan Intensi Prosocial Dengan Kepuasan Kerja Pustakawan Universitas Gadjah Mada. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*", Volume II, (2) 2005: 18-24.

Widada, S. 2004. Model dan Strategi Pengembangan Perpustakaan. *Journal of Library Science and Information Studies*, Volume II, No. 1, Desember 2004, hal. 1-10.

Handayani, R., Keban, V.D. Analisis Analisis Kepuasan Pemakai Terhadap Layanan Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiohumanika*, April 2004, (2) 204-217.

Manghiyaga, A.A. A.P. 2005. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.

Muzota, D. 1998. Perubahan Paradigma Layanan Perpustakaan Menakuti Era Teknologi Informasi dalam E. Kusumadiksha. *Diseminasi Informasi*. Pusat Studi dan Riset Pengantar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Remaja Rosdakarya.

Sugiyanto, Tri Dik. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sugiono, H. 1996. *Perilaku Masyarakat Dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyanto, Tri Dik. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sugiyanto, Tri Dik. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Era Kebangkitan Kepustakawanan Indonesia

Oleh: Lasa Hs

Pendahuluan

Perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan selalu berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tingkat perkembangan kecerdasan masyarakat. Perkembangan ini meliputi aspek managerial, sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun koleksinya.

Semula perpustakaan dikonotasikan sebuah gedung/ruang sebagai tempat buku dengan segala bentuknya ditunggu petugas yang agak judes. Kini pengertian perpustakaan telah berubah menjadi institusi keilmuan yang dikelola secara profesional. Keberadaan perpustakaan dengan tujuan utama untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa . Mereka akan mampu sejajar dengan bangsa lain apabila mampu memanfaatkan perpustakaan dan sumber informasi lain sebagai sumber pendidikan, informasi, penelitian, pelestarian, dan rekreasi kultural. Maka keberadaan perpustakaan yang representatif akan mampu membangkitkan kecerdasan mereka dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkehidupan secara individu.

Latar Belakang

Era keterbukaan ini merupakan era yang kondisional kebangkitan kepustakawanan. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Keterbukaan Informasi dan Kemajuan Teknologi.

Era keterbukaan ini merupakan peluang tiap individu untuk menciptakan informasi, mengakses, mengelola, dan mengembangkannya. Dari sinilah seseorang akan eksis dalam kehidupan intelektual dan kemasyarakatan. Sebab mereka mampu membangkitkan dirinya dan membangunkan kesadaran masyarakat dan bangsanya.

2. Perkembangan Ilmu Perpustakaan

Sesuai tuntutan dan peningkatan kebutuhan masyarakat, kini di Indonesia terdapat 24 perguruan tinggi negeri/swasta yang membuka jurusan /program studi/minat bidang perpustakaan sejak

diploma sampai doktor. Perkembangan pendidikan kepustakawanan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat pada bidang tersebut. Di samping itu meningkatnya pendidikan kepustakawanan berarti mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan sumber belajar yang berupa perpustakaan yang representatif.

3. Perkembangan Profesi Pustakawan

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai tenaga kependidikan, fungsional, dan tenaga profesi. Dalam hal ini Pemerintah tengah mengembangkan profesi ini antara lain keluarnya beberapa peraturan dan perundangan tentang perpustakaan dan kepustakawanan misalnya SK Menpan No. 132/2002 yang saat ini dalam proses revisi karena dianggap kurang mengadopsi perkembangan kegiatan kepustakawanan. Sebagai pedoman pelaksanaan keputusan tersebut kini Perpustakaan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan pedoman kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Di samping itu sebagai tindak lanjut

dan realisasi undang-undang tersebut, kini sedang disusun standarisasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.

Beberapa peraturan perundangan lain merupakan peluang pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peraturan dan perundangan itu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan, dan lainnya

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa. Kemajuan bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas pendidikannya. Dalam hal ini Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain perbaikan sarana prasarana, sertifikasi guru, maupun peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN mulai anggaran 2009.

Tujuan

Kepustakawanan merupakan sumber daya

yang mampu menggerakkan bidang lain. Sumber ilmu pengetahuan ini berperan strategis dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal. Pengembangan ini dengan tujuan:

1. Mengembangkan Berbagai Bidang

Dalam usaha mengembangkan berbagai bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi terkait. Bahkan cepat atau lambat suatu bidang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dalam bidang itu sendiri

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Dalam berbagai survei dan penelitian ditunjukkan bahwa sumber daya manusia kita menduduki posisi bawah di tingkat dunia bahkan di tingkat ASEAN. Hal ini tentu saja dipengaruhi rendahnya kualitas pendidikan kita. Selama ini pendidikan kita masih berorientasi pada NEM, IP, dan gelar dengan mengabaikan penguasaan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan wawasan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan serius tentang sumber informasi yang bernama perpustakaan.

3. Mengembangkan profesi Pustakawan

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Maka wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai profesi, fungsional, dan tenaga kependidikan akan eksis atau tidak tergantung upaya pustakawan itu sendiri dan lembaga/organisasi terkait. Dalam hal

ini Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI telah dan sedang mengembangkan profesi ini. Bukti-bukti empiris langkah-langkah tersebut antara lain pengakuan pustakawan sebagai fungsional dengan terbitnya SK Menpan berturut-turut Nomor 18 Tahun 1988, Nomor 33 Tahun 1998, dan Nomor 132 Tahun 2002. Kini SK Menpan tersebut dalam proses revisi. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan pedoman dan standar yang kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kualitas perpustakaan dan pustakawan, maka kini sedang disusun standarisasi perpustakaan (perguruan tinggi, khusus, sekolah, dan umum) dan sertifikasi pustakawan.

Kepustakawanan dalam Pusaran Sejarah

Istilah kepustakawanan secara formal di negeri ini muncul pada SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 dan SK MENPAN Nomor 132 Tahun 2002. Dalam SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 kepustakawanan diartikan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kemudian dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa kepus-

takawanan adalah ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Kepustakawanan telah berkembang lama di Amerika antara lain ditemukannya Sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey/*Dewey Decimal Classification/DDC* oleh Melville Louis Kossuth Dewey pada tahun 1876. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1876 di Philadelphia lahir organisasi kepustakawanan American Library Association/ALA. ALA merupakan organisasi kepustakawanan terbesar dan tertua di dunia itu besar pengaruhnya terhadap pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan (Feather and Sturges, 2003 dalam Lasa Hs, 2006).

Sesuai perkembangan intelektual manusia, maka perkembangan perpustakaan semakin luas. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perpustakaan telah berkembang Sebelum Masehi di Mesir, Persia, dan Cina. Misalnya saja Raja Ashurbanipal (668 - 631 SM) telah membangun perpustakaan dan memiliki koleksi lebih dari 20.000 *clay tablet*. Dalam pengelolaannya tentu saja diperlukan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kepustakawanan semakin menunjukkan eksistensinya antara lain dengan ditemukannya teori katalogisasi oleh Antonio Panizi (Itali) pada tahun 1841 M yang ditulisnya dalam buku *Rules for Compiling of the Catalogue*.

Kemudian sistem Klasifikasi Persepuluhan Universal/*Universal Decimal Classification* diciptakan oleh Paul Otlet dan Henri La Fontaine (Belgia) pada tahun 1889.

Pengetahuan tentang perpustakaan dan informasi semakin kokoh dengan ditemukannya *Five Laws of Library Science* oleh Shiyali Ramamrita Ranganathan seorang pustakawan India. Dalam filosofi tersebut, kepustakawanan bukan sekedar pelayanan informasi, tetapi lebih menekankan kajian-kajian tentang informasi dan aspek-aspeknya. **Prinsip pertama** hukum perpustakaan tersebut adalah *books are for use* dimaksudkan bahwa rekaman ilmu pengetahuan dan informasi itu harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Sumber-sumber informasi yang tidak dimanfaatkan berarti kemubadziran. Hal ini berarti bahwa semua hal yang mendukung penyebaran dan pengembangan informasi menjadi tanggung jawab perpustakaan. **Prinsip kedua** *every reader his book*, berarti bahwa tiap pemustaka bahkan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, mengelola, menyebarkan, dan mengembangkan informasi. Oleh karena itu pustakawan harus pandai-pandai mempromosikan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Maka disinilah makna bahwa informasi itu menjadi komoditi masyarakat. **Prinsip ketiga** *every book its reader*, berarti bahwa informasi dan ilmu

pengetahuan itu untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun aliran politik. Prinsip ini memberikan peluang dalam penyebaran informasi seluas-luasnya. **Prinsip keempat** adalah *save the time of the reader*. Hal ini berarti bahwa siapa yang cepat memperoleh informasi, maka mereka dapat memanfaatkannya/waktu secara efisien dan efektif untuk melakukan aktivitas. Apalagi akses informasi ini didukung teknologi informasi yang akan mempermudah dan mempercepat kegiatan tersebut. **Prinsip kelima** adalah *a library is a growing organism*. Hal ini berarti bahwa sumber informasi selalu tumbuh dan berkembang. Perkembangan ini menuntut adanya layanan informasi yang lebih efektif dan efisien.

Penemuan Shiyali Ramamrita Ranganathan ini mendorong adanya kajian-kajian kepustakawanan dan dari sinilah lahir teori *conspectus*, bibliometrika, *scientrometrics*, dan informatika. Kemudian kajian utama informatika ini meliputi hukum bibliometrika klasik, analisis sitasi dan *co-citation*, indikator ilmiah/*scientific indicators*, pertumbuhan dan perhatian pertumbuhan/*abscelescience* dan penggunaan sumber daya (Walfrom, 2000 dalam Pendit, 2003: 21-22).

Indonesia

Kepustakawanan di Indonesia telah dimulai sejak lama dan diduga sejak tahun 400 an saat

lingga berupa batu dengan tulisan Palawa ditemukan dari periode Kutai. Lingga tersebut berisi tulisan tentang raja Kutai (Sulistya-Basuki, 1994: 7). Ini kalau digunakan teori bahwa kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Hal ini juga diperkuat keterangan Fa-Hsien seorang musafir yang menyatakan bahwa di kerajaan Ye-poti (Tarumanegara) dijumpai kaum Brahmana yang dalam mengajarkan agama tentunya berdasarkan buku-buku keagamaan.

Kehadiran orang-orang Inggris, Perancis, dan Denmark ke Indonesia tidak memengaruhi kepustakawanan. Mereka ke nusantara ini semata-mata untuk melakukan kegiatan bisnis.

Embrio perpustakaan di Indonesia diduga sudah muncul pada masa kejayaan Majapahit. Saat itu para pujangga telah menulis karya sastra di atas daun lontar, bambu, kulit kayu, atau kulit bambu. Tulisan-tulisan itu berisi doa, mantera, silsilah raja, pelipur lara, dan ajaran kepercayaan yang disimpan di istana raja sebagai koleksi kerajaan.

Mulai tahun 1.000 an sastra Jawa semakin berkembang dan muncullah karya sastra agung oleh para pujangga kraton. Karya sastra yang terkenal saat itu antara lain Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa, Bharata Yudha karya Mpu Sedah

dan Mpu Panuluh. Kemudian pada abad XIV Mpu Tantular termasyhur dengan karya sastranya (Nurhadi, 1983: 32)

Sementara itu menurut catatan Sulistya-Basuki (1994: 10) bahwa Belanda pada tahun 1624 merencanakan untuk mendirikan perpustakaan gereja di Batavia (sekarang Jakarta). Namun karena berbagai pertimbangan dan kesulitan, baru pada tanggal 27 April 1643 perpustakaan itu berdiri. Lebih satu abad kemudian berdirilah perpustakaan khusus di Batavia pada tanggal 24 April 1778 dengan nama *Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku pertama di Indonesia pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae artiumcientiaerumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus* hasil suntingan P. Bleeker. Lembaga tersebut dalam perjalanannya berganti nama menjadi Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang pada tahun 1950 lembaga ini menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lembaga ini pada tahun 1962 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Museum Pusat dan saat itu juga telah memiliki beberapa koleksi. Koleksi ini lalu dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Dalam perjalanannya kemudian pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional ini dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan yang pada tahun

1989 dilebur lagi menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional RI.

Untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia, Belanda mendirikan beberapa lembaga dan balai di beberapa kota antara lain Lembaga Meteorologi dan Geofisika (1866), Landsarchief (Arsip Nasional) (1892), Biro Pusat Statistik (1925) di Batavia. Kemudian di Bogor berdiri Lembaga Kepustakaan Bibliotheca Bogoriensis (1842), Lembaga Penyakit Hewan (1908), Balai Penyelidikan Pertanian (1918). Kemudian di Bandung didirikan Perpustakaan Negara Pasteur (1890), Balai Hidrologi dan Hidrometri (1914), dan Observatorium Boscha (1920) yang kemudian menjadi Lembaga Astronomi Lembang. Pendirian lembaga-lembaga tersebut juga diikuti pendirian perpustakaan masing-masing yang merupakan awal perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia.

Organisasi Kepustakawanan

Dalam pengembangan profesi diperlukan organisasi profesi. Organisasi ini sebagai media penyaluran aspirasi anggota, menyejahterakan anggota, melindungi anggota, dan menjaga kualitas layanan profesi. Organisasi kepustakawanan di Indonesia menurut beberapa catatan didirikan pertama kali pada tahun 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) atas saran Dr. H.J. van

Lummel. Beliau adalah seorang guru di HBS Koning Wilhelm di Batavia. Kemudian pada tahun 1916 terbentuklah organisasi Vereniging tot Bevordering van het Bibliothekwzenen (Perkumpulan Untuk Memajukan Ilmu Perpustakaan) yang bertujuan: 1) mendorong berdirinya perpustakaan baru dan membantu perpustakaan rakyat yang telah ada; 2) memajukan usaha sentralisasi perpustakaan; 3) mengusahakan peminjaman antarperpustakaan di Hindia Belanda (Indonesia); 4) memajukan lalu lintas pertukaran dan peminjaman bahan pustaka di dunia internasional; 5) mengumpulkan dan memajukan sumber referensi dan tugas rujukan; 6) mendirikan biro penerangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dokumentasi; 7) mendirikan gedung untuk perpustakaan umum; 8) usaha lain untuk tercapainya tujuan tersebut.

Keanggotaan organisasi ini semula terbatas di Batavia lalu menyebar ke Medan, Surabaya, Tegal, Semarang, Bogor, Bandung, Bondowoso, dan Salatiga. Saat itu tercatat 62 orang anggota dan terbanyak dari perpustakaan khusus. Sampai dengan tahun 1920, organisasi ini tak terdengar kegiatannya dan sejak itu pula sampai pendudukan Jepang praktis tidak ada organisasi kepustakawanan.

Sejak Indonesia merdeka mulai tumbuh kesadaran untuk mendirikan perpustakaan dan

perlunya wadah untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antarperpustakaan. Maka pada tahun 1949 berdirilah organisasi kepustakawanan Vereniging van Bibliotheca Resen van Indonesie di Jakarta dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan kerjasama antarperpustakaan. Kegiatan ini berhenti menjelang tahun 1950. Kemudian pada tahun 1953 di Jakarta berdiri Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API, yakni perkumpulan ahli perpustakaan di Yogyakarta dan Bogor dan masih bersifat lokal. Atas anjuran Depdikbud saat itu berlangsung Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia tanggal 25 - 27 Maret 1954 di Jakarta. Beberapa keputusan konferensi ini antara lain: 1) mendorong berdirinya Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI; 2) perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan; 3) perlu adanya Dewan Perpustakaan Nasional; 4) mendirikan perpustakaan umum; 5) kerjasama antarperpustakaan di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API bergabung dengan Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI. Kemudian pada Kongres PAPSI bulan April 1956 diputuskan untuk diperluas dan nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/

PAPADI. Kongres PAPADI pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 - 22 Oktober 1957. Kemudian pada pertemuan antar anggota di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1962 dan organisasi ini berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/APADI. Sementara itu pada tanggal 5 Desember 1969 di Jakarta terbentuk Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia/HPCI dengan tujuan: 1) membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia; 2) memupuk hubungan antar anggota.

Kesadaran perlunya organisasi kepustakawanan yang kuat semakin meningkat, maka muncul pemikiran adanya penyatuan beberapa organisasi kepustakawanan yang telah ada. Kemudian terjadilah pertemuan pada tanggal 21 Januari 1973 yang diikuti oleh pengurus APADI Pusat, APADI Cabang Jakarta, Bogor, Bandung, HPCI, dan Himpunan Pustakawan DIY di Bandung. Dalam pertemuan itu disepakati akan menggelar Kongres Pustakawan Se Indonesia pada tanggal 5 - 7 Juli 1973 di Ciawi Bogor. Dari kongres itulah lahir Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI dan Drs. Sukarman K. terpilih sebagai ketua, Drs. J.P. Rompas sebagai sekretaris, dan Ny. Yayah Wartomo, SH sebagai bendahara. IPI sebagai organisasi profesi bertujuan: 1) menghimpun, menampung, dan menyalurkan aspirasi mereka yang berprofesi dalam ilmu perpustakaan dan

ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dan atau bekerja dalam bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lain yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perpustakaan; 2) mengusahakan mereka yang termasuk dalam pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar ini pada tempat yang semestinya di dalam masyarakat; 3) meningkatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat; 4) menempatkan ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan pada tempat yang semestinya di antara ilmu-ilmu pengetahuan.

Ikatan Pustakawan Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pustakawan di negeri ini melalui berbagai seminar, pelatihan, kunjungan, dan penerbitan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh IPI antara lain adanya dikotomi pustakawan negeri dan pustakawan swasta, seleksi anggota, akreditasi pendidikan kepustakawanan, dan peningkatan kualitas pustakawan.

Memang diakui bahwa semula Ikatan Pustakawan Indonesia menjadi wadah bagi seluruh pustakawan Indonesia. Organisasi ini telah melakukan berbagai usaha dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama dengan tugas dari lembaga tempat dimana pustakawan bekerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPI

selama ini antara lain: 1) upaya penambahan jumlah perpustakaan; 2) memperjuangkan profesi pustakawan sebagai tenaga fungsional; 3) mempromosikan perpustakaan di kalangan masyarakat dan pemerintahan; 4) melakukan kerjasama dengan organisasi terkait dengan profesi pustakawan; 5) memberikan pembinaan terhadap anggota dengan berbagai kegiatan ilmiah; 6) memberikan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pustakawan; 7) berperan aktif untuk melahirkan berbagai pedoman dan standar perpustakaan; 8) berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Perpustakaan; dan 9) aktif dalam berbagai kegiatan nasional, regional, dan internasional dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi (Zulfikar Zen, 2006).

Era reformasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 membawa perubahan besar. Kekuasaan yang dulu cenderung sentralistik dan militerisme berubah menjadi pemerintahan desentralistik dan dunia demokrasi mulai terbuka. Kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik terbuka luas, sehingga pada Pemilu 2009 nanti terdapat 38 partai yang siap berlaga. Hal ini juga berpengaruh pada aspek kehidupan individu, masyarakat, dan profesi. Dari iklim inilah lalu lahir beberapa organisasi kepustakawanan antara lain Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI (12 Oktober 2000) di Ciawi

Bogor, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia/FPKI (18 Nopember 2000), Forum Perpustakaan Umum Indonesia/FPUI (4 Juni 2002) di Cipayung Bogor, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia/FPSI (8 Agustus 2002) di Cisarua Bogor, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia/ISIPII (23 Maret 2006), dan Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA (26 Mei 2007) di kota Yogyakarta yang didirikan oleh Lasa Hs dan kawan-kawan.

Pendidikan Kepustakawanan

Pendidikan kepustakawanan di Indonesia semula berupa kursus yakni Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (20 Oktober 1952 - 1955) yang diikuti oleh para lulusan SLTA. Kursus yang berlangsung dua tahun itu untuk memenuhi kebutuhan akan ahli-ahli perpustakaan pada semua jenis perpustakaan, sejak perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, sampai pada perpustakaan instansi/khusus. Kursus ini pertama kali dimulai tanggal 20 Oktober 1952 berdasarkan SK Menteri PPK tanggal 8 September 1952 Nomor: 30418/Keb. Kemudian pada tahun 1955 kursus ini disempurnakan menjadi dua setengah tahun dengan pengakuan lulusannya sama dengan lulusan sarjana muda (golongan E II) dan nama

kursus itu diubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan di bawah pengawasan Biro Perpustakaan. Pada tahun 1959 muncul pemikiran untuk meningkatkan kursus ini menjadi Akademi Perpustakaan. Setelah didiskusikan akhirnya kursus ini menjadi Sekolah Perpustakaan sebagai terjemahan Library School di luar negeri yang masa studinya menjadi 3 tahun setelah SLTA. Setelah kursus dan sekolah perpustakaan itu berjalan sekitar 9 tahun, maka timbul pemikiran untuk lebih ditingkatkan lagi, lalu bidang perpustakaan dijadikan salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 7 Oktober 1963 secara administratif Jurusan Ilmu Perpustakaan ini dipindahkan dari FKIP IKIP (saat itu) ke Fakultas Sastra (kini FIB) UI sampai sekarang. Bidang perpustakaan semakin berkembang lalu di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka program studi, jurusan, maupun minat bidang perpustakaan baik jalur profesional maupun jalur akademik. Adapun perguruan tinggi yang menyelenggarakan jalur profesional antara lain:

No	Perguruan Tinggi	Program
1.	Universitas Gadjah Mada	D 3
2.	Universitas Indonesia	D 3
3.	UIN Sunan Kalijaga	D 3
4.	Universitas Diponegoro	D 3
5.	Universitas Negeri Sebelas Maret/UNS	D 3
6.	Institut Pertanian Bogor	D 3
7.	Universitas Airlangga	D 3
8.	Universitas Hasanuddin	D 3
9.	Universitas Bengkulu	D 3
10.	Universitas Lampung	D 3
11.	Universitas YARSI	D 3
12.	Universitas Sumatera Utara	D 3
13.	Universitas Lancang Kuning	D 3
14.	Universitas Sam Ratulangi	D 3
15.	Universitas Terbuka	D 3
16.	IAIN Imam Bonjol	D 3
17.	IAIN Ar Raniry Aceh	D 3
18.	Universitas Muhammadiyah Makasar	D 3

Adapun beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan, program studi, maupun minat bidang perpustakaan jalur akademik antara lain:

No	PT	Jur./Prodi/minat
1.	Universitas Gadjah Mada	S 2
2.	UIN Sunan Kalijaga	S 1
3.	Universitas Negeri Yogyakarta	S 3
4.	Universitas Indonesia	S 1, S 2
5.	Universitas Padjadjaran	S 1, S 2
6.	Universitas YARSI	S 1
7.	Universitas Diponegoro	S 1
8.	Universitas Wijayakusuma	S 1
9.	UIN Syarif Hidayatullah	S 1
10.	Univ. Pendidikan Indonesia	S 1
11.	Universitas Hasanudin	S 1
12.	Universitas Sumatera Utara	S 1
13.	Universitas Islam Nusantara	S 1

Banyaknya lulusan pustakawan perguruan tinggi ternyata belum mampu memengaruhi jumlah pustakawan (PNS) bila dibanding dengan tenaga perpustakaan yang lulusan non perpustakaan. Berdasarkan pendidikan formal perpustakaan dan non perpustakaan per 18 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Bidang Perpustakaan	Bidang Non Perpustakaan	Jumlah
1.	SLTA	-	849	849
2.	D1	-	15	15
3.	D2	369	22	391
4.	D3	274	38	312
5.	SM	6	133	139
6.	S1	435	671	1106
7.	S2	103	57	160
Jumlah		1187	1785	2.972

Sumber: Kartini, 2008: 4

Melalui pengembangan pendidikan kepustakawanan tersebut dan berbagai pelatihan, diharapkan mampu menciptakan pustakawan yang profesional, mandiri, kreatif, berwawasan ke depan, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepustakawanan perlu memperhatikan pilar-pilar pendidikan yakni belajar mengetahui/*learning to know*, belajar melakukan/*learning to do*, belajar hidup dalam kebersamaan/*learning to live together*, dan belajar menjadi diri sendiri/*learning to be*.

Berangkat dari pemikiran ini perlu peninjauan ulang akan kurikulum pendidikan kepustakawanan. Di era yang kompetitif ini perlu penekanan pada penguasaan teknologi informasi, profesionalisme, kewirausahaan, manajemen,

pengembangan diri, dan manajemen ilmu pengetahuan.

Kinerja pustakawan pada umumnya kurang profesional dan masih berorientasi pada rutinitas dan birokrasi. Meskipun secara formal kita telah memiliki 1106 pustakawan lulusan S1 dan 160 orang lulusan S2 baik pustakawan maupun non pustakawan ternyata belum mampu mengembangkan prosedur, teori, dan pemikiran kepustakawanan yang signifikan.

Faktor-Faktor Kebangkitan

Dalam pengembangan kepustakawanan terdapat peluang dan kondisi pendukung antara lain peraturan perundangan, anggaran pendidikan 20 % dari APBN, perkembangan pendidikan kepustakawanan, upaya sosialisasi kepustakawanan, peran organisasi profesi, dan era keterbukaan.

1. Perangkat Peraturan/Perundangan, dan Kebijakan

Dalam usaha pengembangan kepustakawanan sebenarnya tersedia seperangkat peraturan perundangan sebagai unsur pendukung. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan kepustakawanan dalam arti luas telah memberikan peluang pengembangan bidang tersebut. Beberapa peraturan dan perundangan itu antara lain:

a. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional

Kedudukan Perpustakaan Nasional merupakan kedudukan yang strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang maju dapat dilihat dari peradaban, budaya, kemajuan berpikir, dan perilaku bangsa itu sendiri. Kemudian tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat ditengarai dari kondisi perpustakaan sebagai lembaga penyimpan hasil budaya dan peradaban dari waktu ke waktu.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Kedudukan dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan suatu keuntungan. Dengan kedudukan ini Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dengan tugas pokok tersebut Perpustakaan Nasional memiliki wewenang dan tanggung jawab besar terhadap pengembangan semua jenis perpustakaan dan tenaga perpustakaan sebagai

penggerak sumber daya perpustakaan yang lain. Dengan adanya perpustakaan yang representatif diharapkan mampu memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kemajuan suatu bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas dan kuantitas karya tulis, karya cetak, dan karya rekam sebagai media penyimpan hasil pemikiran, peradaban, dan budaya suatu bangsa.

Di sinilah letak peran Perpustakaan Nasional RI yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 sebagai aset nasional yang menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, meningkatkan ketrampilan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas rohaniah dan jasmaniah.

Keberadaan Perpustakaan Nasional sebagai pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara itu merupakan posisi strategis dalam kebangkitan dunia kepustakawanan. Sebab dengan kedudukan itu Perpustakaan Nasional memiliki tugas-tugas:

- a). Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b). Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan

- c). Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d). Mengembangkan standar nasional perpustakaan

Dengan demikian, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab untuk:

- a). mengembangkan koleksi nasional;
- b). melestarikan hasil budaya bangsa;
- c). memasyarakatkan perpustakaan;
- d). mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri (UU No.43 Tahun 2007)

Apabila diperhatikan *point-point* tugas Perpustakaan Nasional tersebut memang cukup berat dalam pengembangan sistem perpustakaan dan kepastakawanan secara nasional terutama dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam pembangunan bangsa tidak lepas dari pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. Di sinilah peran Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lain dalam pengelolaan sumber ilmu, informasi, dan teknologi. Sebab kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengembangan intelektual dan artistik bangsa itu sendiri.

- b). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak & Karya Rekam

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya antara lain diperlukan adanya usaha

pelestarian dan pemanfaatan hasil karya intelektual maupun karya artistik anak bangsa. Kekayaan itu merupakan manifestasi dan ekspresi cipta, rasa, dan karya manusia Indonesia. Khazanah keilmuan ini merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penyebaran informasi.

Sehubungan dengan tujuan itulah, maka disusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penyusunan ini dalam rangka usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Karya cetak dan karya rekam tersebut pada hakekatnya berisi pemikiran, informasi, ilmu pengetahuan, ajaran, nilai, dan hasil penelitian yang perlu diwariskan, disebarluaskan, dan dikembangkan lebih jauh. Hal ini untuk menjaga agar dalam perkembangan suatu bangsa tidak tercabut akar-akar budaya. Disinilah perlunya pelestarian oleh lembaga negara sebagai kekayaan intelektual bangsa.

Undang-undang tersebut merupakan upaya agar karya rekam, karya tulis, dan karya cetak itu terkumpul menjadi koleksi nasional. Yakni semua karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam

maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koleksi nasional ini akan terwujud apabila semua penerbit, perusahaan rekaman, dan perorangan berkesadaran untuk menyerahkan produk mereka ke Perpustakaan Nasional maupun Badan Perpustakaan setempat. Disamping itu apabila masyarakat terinspirasi oleh undang-undang ini, maka mereka akan menyerahkan karya intelektual dan artistik ke perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan umum di mana mereka menjadi anggota potensial. Sebab keberadaan perpustakaan di suatu lembaga dan masyarakat sebenarnya merupakan lembaga deposit bagi masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai perubahan politik yang mengarah pada desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini dimungkinkan dilaksanakan oleh provinsi lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa setiap Penerbit dan Pengusaha Rekaman wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekam kepada Badan Perpustakaan (Pasal 3). Kewajiban ini merupakan upaya pendokumentasian karya intelektual dan karya artistik masyarakat setempat, pelestarian, dan pengembangannya. Sebab karya-karya tersebut merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa. Hasil karya manusia ini sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya dan terutama pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

c. SK MENPAN No. 132 Tahun 2002

Jabatan pustakawan diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional pertama kali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan. Setelah peraturan tersebut berjalan selama sepuluh tahun, maka dilakukan revisi dan terbitlah Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998. Mengingat perkembangan fungsional begitu cepat, lalu Pemerintah menata jabatan-jabatan fungsional yang mulai tumbuh di negara kita. Lalu untuk pengembangan

jabatan fungsional diterbitkan Surat Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Keputusan MENPAN tersebut diperlukan petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pustakawan tim penilai, dan pejabat terkait. Maka Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan seluruh Indonesia menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan mampu menyamakan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangannya dapat optimal.

Petunjuk teknis tersebut ternyata masih menimbulkan berbagai persepsi dan mengalami berbagai kendala dalam penerapannya. Dengan berbagai pertimbangan dan realita di lapangan, maka Perpustakaan Nasional RI menerbitkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008.

Dalam Petunjuk Teknis yang terakhir ini diberikan penjelasan, contoh-contoh kasus, dan lampiran-lampiran yang memudahkan pema-

haman. Dengan demikian perbedaan penafsiran antara pihak-pihak terkait dapat diperkecil.

Apabila pustakawan mampu memahami peraturan dan perundangan tersebut secara cerdas, maka mereka akan mampu mencapai karir puncak. Namun disayangkan sebagian besar pustakawan kita kurang bisa menangkap peluang tersebut dan selalu saja berharap kenaikan tunjangan fungsional tanpa menghasilkan produk intelektual sebagai ciri khas seorang profesional.

Seharusnya mereka mampu melahirkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peluang itu tidak mungkin diperoleh oleh para pegawai administrasi pada umumnya. Seorang pustakawan berkesempatan luas untuk mengembangkan diri melalui kegiatan mengajar di SLTA, memberi kuliah di perguruan tinggi, memberikan bimbingan, melakukan penelitian, menjadi nara sumber pertemuan ilmiah, menjadi konsultan, maupun menjadi penulis. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan kemandirian yang merupakan ciri profesional. Karena rendahnya pemahaman tentang hakekat profesi, maka kinerja dan pola pikir para pustakawan belum menampakkan kemandirian.

Di satu sisi, pustakawan sebagai sumber daya yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi seharusnya mampu menggerakkan

sumberdaya manusia dan fungsional lain. Sebab dalam pengembangan semua bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi.

d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Rancangan undang-undang perpustakaan telah lama disiapkan dan baru tahun 2007 berhasil disetujui Dewan Perwakilan RI sebagai undang-undang meskipun harus melewati berbagai proses. Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774 tanggal 1 Nopember 2007 itu merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Hal ini merupakan secercah harapan adanya kebangkitan kepastakawanan di Indonesia.

Perkembangan kepastakawanan tidak lepas dari perkembangan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan merupakan kajian dan pendekatan proses pengumpulan, pengelolaan, pelestarian, dan pemberdayaan sumber-sumber informasi. Sebagai suatu ilmu, dalam kajian-kajian ini ilmu perpustakaan mengadopsi teori-teori maupun konsep dari bidang lain seperti statistik, psikologi, manajemen, komputer, matematika, bisnis, dan lainnya. Dari interaksi ini lahirlah ilmu baru seperti statistik perpustakaan, teknologi infor-

masi perpustakaan, psikologi perpustakaan, dan lainnya. Dengan adanya interaksi yang semakin intensif, maka akan semakin banyak dilahirkan konsep dan teori baru.

Undang-undang yang menelan biaya milyaran rupiah itu juga akan mengangkat eksistensi perpustakaan pada umumnya. Kalau dulu perpustakaan dimaknai sebagai gedung/ruang untuk tempat penyimpanan koleksi, maka kini pengertian perpustakaan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kini perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 ayat 1).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perpustakaan sebagai lembaga ilmu pengetahuan harus dikelola oleh tenaga profesional dengan standar tertentu, mengelola sumber ilmu pengetahuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat. Melalui sumber informasi, fasilitas, dan sarana prasarana yang dikelola perpustakaan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan proses belajar sepanjang hayat/*long life learning* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan perpustakaan ke depan tidak asal ada. Penyelenggaraan perpustakaan harus dikelola secara profesional dan dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pustakawan sebagai sumber daya yang menggerakkan perpustakaan itu bukan sembarang orang yang bekerja di perpustakaan tanpa memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan kompetensi dalam bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan pernyataan yang tegas ini dapat dipahami bahwa pustakawan adalah seorang ilmunan karena memiliki ilmu pengetahuan tentang kepustakawanan dan berkewajiban untuk menyumbangkannya melalui media cetak, tatap muka (mengajar, menyuluh, menyampaikan makalah dalam temu ilmiah), atau media cetak (buku, surat kabar, majalah, jurnal dll) maupun melakukan penelitian (SK MENPAN No. 132/2007).

Dari kesempatan ini seorang pustakawan memiliki peluang besar untuk berprestasi di bidang kepustakawanan sehingga dapat mencapai

karir puncak yakni Pustakawan Utama. Hal ini merupakan bentuk penghargaan formal terhadap pustakawan sebagai tenaga profesional dan ilmunan sama dengan guru, dosen, dokter, peneliti, hakim, dan lainnya.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan titik awal/*starting point* kebangkitan (angin segar) dan merupakan landasan hukum yang kokoh sebagai keberadaan, pelaksanaan, dan pengembangan perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi memiliki akses strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan pembelajaran masyarakat secara formal, informal, maupun nonformal. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran dan fungsi untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Anggaran Pendidikan 20 % APBN

Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan tahun 2009 menjadi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN. Terlepas dari kepentingan politik, langkah ini merupakan iktikad baik dan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan kecerdasan

bangsa yang harus dipikirkan bersama. Kemajuan bangsa memang terletak pada kualitas pendidikannya. Dari sinilah, maka disusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka ditetapkan visi pendidikan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani dan masyarakat Indonesia baru. Masyarakat Indonesia baru tersebut adalah masyarakat yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak azasi manusia, saling pengertian, dan berwawasan global (Mulyasa, 2003: 19)

Pemenuhan anggaran 20 % dari APBN itu tentunya untuk meningkatkan sarana fisik dan non fisik penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain berupa perpustakaan sekolah. Sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan tetap harus memperhatikan standar nasional pendidikan.

Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik. Dengan penyediaan koleksi yang memadai

ini, diharapkan mampu menambah wawasan siswa dan guru sebagai pendidik. Guru yang kurang wawasannya berakibat tidak mampu berpikir ilmiah apalagi dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Sungguh mengenaskan dunia pendidikan kita apabila para guru tidak mampu menulis karya ilmiah. Kalau demikian bagaimana akan diperoleh lulusan yang berkualitas karena pendidiknya pun tidak memiliki wawasan yang luas.

Guru diangkat sebagai tenaga fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 084/1993. Fungsionalisasi guru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus kesejahteraan guru. Dalam hal ini guru diberi kesempatan untuk berprestasi antara lain dengan indikator angka kredit. Dengan angka kredit yang dapat dicapai, maka setiap guru berpeluang untuk mencapai puncak karir yakni guru utama yang sejajar dengan fungsional lain yakni guru besar, pustakawan utama, dokter utama, peneliti utama, dan lainnya.

Namun demikian, kesempatan itu ternyata kurang dimanfaatkan. Sebab dengan pandainya mengemukakan berbagai alasan, sebagian besar guru tidak mampu memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Tanpa adanya unsur nilai pengembangan profesi ini, maka

seorang guru cukup *pasrah bongkokan* pada golongan IV/a. Sebab untuk naik jabatan/pangkat/golongan IV/b harus membuat karya tulis ilmiah.

Booming guru pada golongan IV/a terjadi di berbagai daerah, dan salah satu contoh terjadi di Kabupaten Kulonprogo. Data stagnasi atau kemandegan kenaikan pangkat guru yang menduduki golongan IV/a di Kabupaten Kulonprogo saat ini mencapai 2.837 dari sekitar 7.000 guru yang tersebar di semua jenjang sekolah atau hampir mendekati separuh jumlah guru (Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008)

3. Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan

Kepustakawanan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dengan demikian mereka yang bergerak dalam profesi kepustakawanan ini harus memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi. Kompeten dalam hal ini berarti bahwa seorang pustakawan harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan di tempat kerja. Dengan demikian, seorang pustakawan dituntut untuk menguasai dan mampu menerapkan ketrampilan tugas, mengelola tugas, manajemen ilmu pengetahuan/*knowledge management*, dan mampu berperan dalam lingkungan pekerjaan.

Seorang profesional akan mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi apabila memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pendidikan kepustakawanan yang dulu berupa kursus ahli perpustakaan selama satu tahun, kini telah dibuka minat bidang/program studi/jurusan ilmu perpustakaan sejak diploma sampai doktor di 24 perguruan tinggi negeri/swasta. Sebab kini seorang diakui sebagai pustakawan bukan karena telah lama bekerja di perpustakaan. Kini, seorang boleh mengaku dirinya sebagai pustakawan apabila memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8). Dengan demikian, pustakawan harus memenuhi kualifikasi standar nasional perpustakaan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah standar tenaga perpustakaan.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan pemilikan kompetensi ini menjadi keharusan mengingat pustakawan itu sebagai pengelola perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dikelolanya diharapkan mampu menjadi sebagai bagian dari masyarakat dunia

dan ikut serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society - WSIS, 12 Desember 2003.

4. Upaya Sosialisasi Kepustakawanan

Pengembangan profesi kepustakawanan dan perpustakaan dipengaruhi oleh usaha para profesional terkait, lembaga pendidikan profesi, organisasi profesi, pemerintah, maupun lembaga tempat bekerja para pustakawan. Usaha-usaha sosialisasi dan promosi yang selama ini telah dilakukan antara lain melalui seminar, workshop, bedah buku, pelatihan, penerbitan, penyuluhan, dan berbagai lomba bidang kepustakawanan melalui media cetak maupun elektronik.

Sosialisasi ini perlu dilakukan terus menerus dan perlu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Sebab perkembangan suatu bidang dipengaruhi sejauh mana usaha para profesional yang terkait.

5. Peran Organisasi Kepustakawanan

Suatu profesi memerlukan organisasi untuk menampung aspirasi, mengembangkan profesi, menyejahterakan anggota, dan mengawasi kualitas profesionalisme. Melalui organisasi ini, para profesional secara mandiri dapat mengatur pengembangan diri dan profesi mereka. Mereka dapat

menentukan arah kebijakan dalam pencapaian prestasi dan karir secara terbuka, bertanggung jawab, dan mengedepankan profesionalisme. Oleh karena itu pustakawan harus mampu berperilaku yang menunjukkan keprofesionalannya yang diterima oleh organisasi profesi dan masyarakat sebagai kliennya.

Seperti halnya organisasi lain, organisasi kepustakawanan tumbuh dari berbagai organisasi lalu menjilma menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI. Kemudian dalam perkembangannya muncul lagi berbagai organisasi kepustakawanan yang bersifat sektarian, jenis, bahkan tingkat intelektual. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketidakmampuan IPI dalam mengadopsi berbagai aspirasi dari mereka yang bekerja di berbagai perpustakaan. Mungkin saja munculnya berbagai organisasi kepustakawanan itu seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI, Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi/FKP2T, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia/ISIPI, Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA memang merupakan kebutuhan untuk eksis dan pengembangan profesi. Hal ini juga terjadi pada organisasi profesi lain di bidang kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia/IDI yang dulu dianggap sebagai satu-satunya organisasi dokter, ternyata kini juga lahir organisasi

untuk dokter-dokter anak, gigi, ahli jantung, penyakit kulit, dan lainnya. Perkembangan ini semata-mata untuk mengembangkan spesialis mereka.

Perkembangan organisasi kepustakawanan memang belum seperti perkembangan organisasi profesi lain seperti IDI, IKAHI, PGRI, IKADIN, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberap faktor:

1. Sistem keanggotaan tidak ada seleksi

Keanggotaan organisasi kepustakawanan (IPI, FPSI, dll) tidak mensyaratkan pendidikan profesi. Hal ini berbeda dengan profesi seperti IDI, PGRI, IKADIN yang mensyaratkan keanggotaan dengan pendidikan profesional seorang dokter, guru, hakim misalnya.

Tidak adanya persyaratan pendidikan profesi ini justru menyulitkan pembinaan dan pengembangan profesi. Sebab dengan adanya heterogenitas pendidikan itu akan terjadi kesenjangan wawasan, cara berpikir, dan komunikasi para anggota

2. Masih tergantung pada birokrasi

Model kepemimpinan kepustakawanan selama bertahun-tahun sangat tergantung pada birokrasi. Hal ini menunjukkan kekurangdewasaan dalam berorganisasi. Dengan ketergantungan ini menunjukkan kurang adanya rasa percaya diri dan kurang mandiri

3. Belum menjadi kebanggaan

Para pengelola perpustakaan belum merasa bangga dan belum menjadi kebutuhan untuk

menjadi anggota organisasi profesi. Keterlibatan mereka dalam organisasi profesi seolah-olah karena adanya keterikatan dinas dan kepentingan sesaat (angka kredit, pergaulan, dll.). Kondisi ini mungkin disebabkan bahwa organisasi profesi itu belum/tidak menyentuh langsung kebutuhan para pengelola perpustakaan. Mereka cenderung pasif bahkan apatis terhadap keberadaan organisasi profesi.

Penutup

Kepustakawanan merupakan ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang keberadaannya memengaruhi bidang lain. Sebab dalam pengembangan bidang dan profesi diperlukan sumber ilmu pengetahuan, dokumentasi, dan informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam. Peran ini perlu ditingkatkan terus menerus sebagai pendorong tercapainya masyarakat yang cerdas secara intelektual, sosial, religis, politik, dan ekonomi.

Pengembangan kepustakawanan memiliki banyak peluang antara lain adanya kebijakan pemerintah, berkembangnya lembaga pendidikan kepustakawanan, organisasi profesi, era keterbukaan, dan adanya usaha sosialisasi. Cepat tidaknya pengembangan ini tergantung usaha pustakawan, tim penilai, lembaga pengguna pustakawan,

organisasi profesi, lembaga tempat bekerja pustakawan, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Daftar Pustaka

- Guru dan Karya Tulis Ilmiah. Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008
- Kartini. Kebijakan Pengembangan Pustakawan. Makalah Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai di Jakarta tanggal 23 - 24 Juli 2008.
- Lasa Hs., 2006. *Profesi Pustakawan: Harapan dan Tantangan*. Pidato Pengukuhan Sebagai Pustakawan Utama UGM tanggal 6 September 2006
- Nurhadi, Muljani A. 1983. *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pendit, Putu Laxman.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sulistya-Basuki. 1994. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kreditnya
- Surat Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 Tentang Pustakawan dan Angka Kreditnya

Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun
Tentang Perpustakaan Nasional RI

Surat Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2007
tanggal 28 Juni 2008 tentang Tunjangan
Fungsional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta. Jakarta: Cemerlang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1990 Tentang Serah Sipan Karya Cetak
dan Karya Rekam

Para Penulis

Ida Fajar Priyanto

Lulusan Loughborg University ini lahir di Kotagede Yogyakarta. Ia kini sebagai Kepala Perpustakaan UGM dan telah menjelajah seantero dunia untuk menyampaikan makalah, studi banding, maupun kunjungan. Pengelola D 3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan S2 Perpustakaan UGM.

Purwono

Lahir tanggal 14 April 1947 di Klaten, kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Beliau juga aktif sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S2 Perpustakaan UGM, Jurusan Ilmu Perpustakaan & Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pustakawan Utama UGM ini pernah menjadi Ketua IPI DIY.

Kini masih dipercaya sebagai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan UGM, UPN, UII, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Disamping itu juga aktif menulis di berbagai media cetak.

Purwani Istiana

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Geografi UGM ini lahir di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1973. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan II DIY tahun 2007. Kini beliau juga aktif menulis artikel bidang perpustakaan yang dimuat oleh Gagasan, Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Papyrus, Buletin UII, Sangkakala, dan Buletin IPI.. Lulusan S 1 IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/workshop bidang perpustakaan dan sebagai Pengurus Forum Pustakawan UGM dan Pengruus IPI DIY.

Nurhayati

Lahir di Blitar 1 Februari 1960. Kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Sejak 1 Mei 1990 sampai tahun 1997 pernah ditugaskan di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM. Lulusan S2 Perpustakaan UGM ini juga mengjar di D 3 Manajalen Informasi & Perpustakaan Fisipol UGM.

Sri Rumani

Pustakawan Madya UGM kelahiran Sleman ini sekarang ditugasi sebagai Penanggungjawab Perpustakaan FISIPOL UGM. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan III Tingkat Nasional. Di samping itu ia dipercaya sebagai Ketua Redaksi Berkala Informasi & Perpustakaan dan Media Informasi. Penulis produktif ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Heri Abi Burrachman Hakim

Putra asli Yogya ini lahir 26 September 1982. Kini ia bekerja di Perpustakaan FISIPOL UGM dan aktif menulis. Artikel-artikelnya dimuat oleh Kompas, Media Informasi, Kedaulatan Rakyat, Bernas Yogya, Fihris, dan Buletin UII. Lulusan S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/workshop bidang perpustakaan.

Pergola Irianti

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Psikologi UGM ini lahir di Yogyakarta 14 Nopember 1958. Ia juga rajin menulis di beberapa publikasi perpustakaan antara lain Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, dan Buletin Perpustakaan UII. Profesi pustakawan yang ditekuninya telah mendorongnya untuk maju melalui pendidikan, penulisan, diskusi, maupun penelitian.

Lasa Hs.

Pustakawan UGM kelahiran Boyolali ini selama 30 tahun bertugas di Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan sejak Nopember 2006 sebagai Kabid Pelayanan Perpustakaan UGM. Di samping sebagai pustakawan, juga sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S 2 Perpustakaan UGM, D 3 Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM, S 1 Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta, dan Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga sebagai redaksi Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Media Informasi, dan Mentari. Sebagai penulis, dari tangannya telah ditulis buku & naskah buku sebanyak 39 judul yang diterbitkan oleh 13 penerbit. Artikel-artikelnya telah dimuat beberapa media cetak.